

Terkendala Izin dan Audit



DI Jawa Tengah, belasan tahun terakhir terdapat lebih dari 30 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sebagian terjerat saat aktif menjabat, sebagian lain terkena kasus setelah purnatugas. Mereka yang masih aktif dan dikenai sangkaan pidana korupsi antara lain Bupati Rembang Mochamad Salim, tersangka kasus dugaan penyimpangan dana penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD 2006-2007 senilai Rp 5,2 miliar.

Kasus Salim ditangani Polda Jateng sejak 2009, namun sampai kini penyidikan belum tuntas. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak 2010. Semula kader Partai Demokrat itu tidak juga diperiksa lantaran izin pemeriksaan dari presiden tak kunjung turun.

Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi soal penghapusan izin presiden untuk penyidikan kepala daerah, Salim diperiksa Polda pada 3 Juli 2013. Namun, hingga kini Polda mengaku masih terkendala audit, sebab belum ada jawaban Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal permohonan audit kerugian negara. Di sisi lain, BPK menyatakan belum memenuhi data-data yang dibutuhkan. Seperti dikatakan anggota BPK Sapto Amal Damandari, pihaknya memang

diminta Polda mengaudit kasus tersebut, namun dari ekspose diketahui ada data yang kurang, sehingga audit kerugian negara belum dapat dikerjakan.

Berharap pada KPK

Beda halnya dengan Soemarmo HS yang disidik KPK dalam kasus suap APBD 2012 Kota Semarang.

Ia ditetapkan sebagai tersangka saat menjabat wali kota Semarang, ditahan sejak 30 Maret 2012, dan kini telah diberhentikan tetap dari jabatannya sejak 13 Mei 2013 setelah perkara pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pejabat aktif lain yang diduga tersangkut kasus hukum adalah Bupati Karanganyar Rina Iriani. Ia dan suaminya (saat itu) Tony Haryono diduga terlibat kasus korupsi pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri Karanganyar yang merugikan negara Rp 21 miliar.

Sampai kini tidak ada penetapan resminya sebagai tersangka dari Kejati Jateng, meski berdasarkan ekspose di Kejaksaan Agung tanggal 13 Oktober 2010 Kejagung merestui penetapan tersangka terhadap Rina.

Rina dan pengacaranya berkali-kali membantah terlibat. Di lain pihak, pegiat antikorupsi ber tekad terus mengawal penuntasan kasus itu. "Kami berharap KPK mengambil alih kasus ini," ujar Koordinator KP2KKN Jateng Oly Viana Agustine.

Selain kasus-kasus itu, lebih dari 20 kepala daerah di Jawa Tengah sudah diproses hukum usai lengser dari jabatannya. Dua diantaranya adalah mantan wakil bupati Karanganyar Sri Sadoyo Harjo Migoeno, terpidana dalam kasus korupsi APBD TA 2001-2002 senilai Rp 2,9 miliar, dan mantan wakil bupati Pati Kotot Kusmanto, terdakwa kasus dugaan korupsi APBD 2003. (Yunantyo Adi-59)